BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

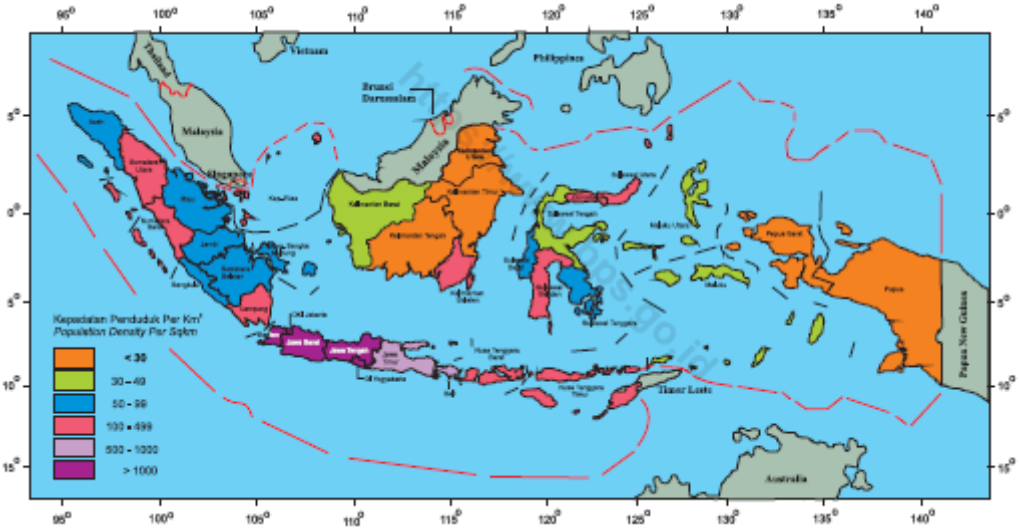

Gambar 1.1 Keadan Geografi dan Kepadatan Penduduk Indonesia 2017

Sumber: Sensus Penduduk (SP) 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia berada di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dengan luas 1.916.862,20 km^2 dan memiliki 16.056 pulau yang terdiri dari 34 provinsi yang terletak di lima pulau besar dan empat kepulauan, yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung di Pulau Sumatera. Kepulauan Riau. DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur di Pulau Jawa. Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur di Kepulauan Nusa Tenggara (Sunda Kecil). Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara di Pulau Kalimantan. Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara di Pulau Sulawesi. Maluku dan Maluku Utara di Kepulauan Maluku dan yang terakhir adalah Papua dan Papua Barat di Pulau Papua.

Berdasarkan Pemerintahan, Indonesia memiliki pendapatan negara sebesar 1.736.060 milyar rupiah dan pengeluaran sebesar 2.133.296 milyar rupiah tercatat mengalami defisit sebesar 397.236 milyar rupiah. Sumber utama pendapatan negara berasal dari pajak mencapai 84,83% dari total penerimaan negara. Berdasarkan penduduk dan ketenagakerjaan jumlah penduduk terbesar berada di provinsi Jawa Barat sebesar 48.037,6 ribu orang dengan jumlah angkatan kerja sebesar 22.391.003

1.2 Latar Belakang Penelitian

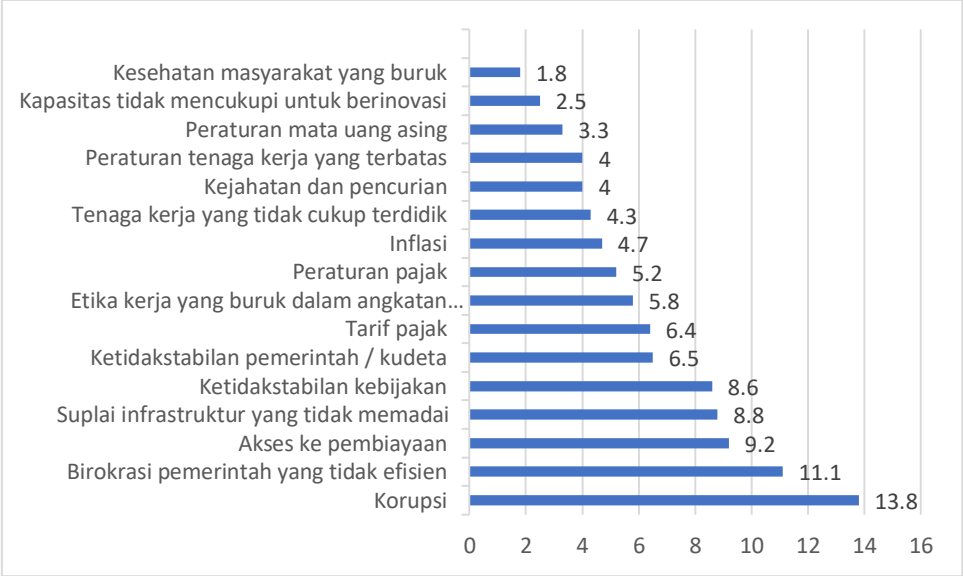

Gambar 1.2 Faktor Penghambat Daya Saing Indonesia

Sumber: World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2017

Peringkat daya saing Indonesia (The Global Cempetitiveness Index) saat ini berada di level 36 menurut laporan World Economic Forum (WEF). Angka ini mengalami kenaikan sebesar 5 level, dibandingkan sebelumnya 41. Sayangnya kenaikan daya saing Indonesia sulit menyaingi negara tetangganya sendiri, seperti Singapura dan Malaysia yang masing-masing berada di posisi 3 dan 23. Terbatasnya akses masyarakat ke lembaga keuangan menjadi faktor ke tiga tertinggi penghambat daya saing di Indonesia. Terbatasnya akses ini membuat sumber permodalan menjadi sulit. Akses ke lembaga keuangan ini merupakan definisi dasar dari inklusi keuangan (Bruhn and Love, 2014).

World bank menjelaskan bahwa akses keuangan adalah langkah pertama menuju inklusi keuangan yang lebih luas karena memungkinkan orang untuk menyimpan uang, mengirim dan menerima pembayaran. Akun transaksi (rekening) sebagai akses ke keuangan juga dapat berfungsi sebagai pintu gerbang ke layanan keuangan lainnya seperti kredit dan asuransi, untuk memulai dan memperluas bisnis, berinvestasi dalam pendidikan atau kesehatan, mengelola risiko yang dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Gambar 1.3 Inklusi Keuangan Indonesia

Sumber: ojk.go.id

Hasil survei indeks inklusi keuangan di tahun 2013 berada di level 59,7% dan 67,8% di tahun 2016. Kenaikan terjadi baik secara gender, tingkat pendapatan, pendidikan, pengetahuan industri keuangan, hingga perbedaan konvensional dan syariah. Namun hal tersebut masih belum cukup mengingat Presiden Joko Widodo menargetkan 75% populasi dewasa dapat mengakses layanan keuangan formal pada 2019 dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Tabel 1.1 Kegiatan Menabung dalam 1 Tahun Terakhir

No	Jenis Kegiatan Menabung	%
1	Menyimpan di rumah atau di dompet	23,2%
2	Meletakan uang di bank dan hanya bergantung pada bunga	10,3%
3	Menyimpan uang pada akun tabungan	71,7%
4	Menyimpan uang pada keluarga	1,9%
5	Menyimpan uang di lembaga keuangan informal	1,5%

6	Menginvestasikan dana selain dana pensiun	0,4%
7	Lainnya seperti membeli ternak, emas dan properti	1,0%

Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016

Menurut data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat, hingga saat ini masih banyak masyarakat produktif Indonesia belum memiliki rekening bank, dari sekitar 241 juta orang penduduk hanya tercatat 175 juta rekening pada tahun 2015, artinya masih banyak penduduk yang menyimpan uangnya secara manual, seperti data survei di atas masyarakat Indonesia masih banyak yang menyimpan uangnya di rumah atau di dompet dan hanya akan menyimpan uangnya di bank bergantung pada bunga saja padahal produk keuangan tidak hanya perbankan saja seperti pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Indeks Inklusi Keuangan Sektoral 2013-2016

No	**Sektor**	**Indeks Inklusi Keuangan 2013**	**Indeks Inklusi Keuangan 2016**		
			Komposit	**Konvensional**	**Syariah**
1	Perbankan	57,3%	63,6%	60,7%	9,6%
2	Perasuransian	11,8%	12,1%	11,8%	1,9%
3	Dana Pensiun	1,5%	4,7%	4,7%	0,0%
4	Lembaga pembiayaan	6,3%	11,8%	11,8%	0,2%
5	Pergadaian	5,0%	10,5%	9,8%	0,7%
6	Pasar Modal	0,1%	1,3%	1,3%	0,01%

Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016

Indeks inklusi keuangan pada tahun 2013-2016 menunjukan banwa inklusi keuangan di Indonesia masih di dominasi oleh sektor perbankan sebesar 63,6% pada tahun 2016 sedangkan indeks Inklusi keuangan yang lain masih banyak yang rendah terutama pasar modal yang merupakan sumber permodalan untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

Masyarakat seringkali masih enggan menggunakannya produk keuangan yang lain karena merasa belum membutuhkan, takut dihadapkan dengan persyaratannya yang rumit, atau gengsi misalnya saat pergi ke pegadaian. Padahal,

penggunaan produk dan jasa keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, dapat membantu melakukan pengelolaan keuangan dengan baik.

Selain perbankan ada produk keuangan lainnya seperti asuransi, dana pensiun, pegadaian, dan pasar modal. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan membeli produk asuransi, artinya sudah ”menabung” perlindungan terhadap risiko kerugian keuangan yang terjadi. Dana yang diberikan kepada perusahaan asuransi, akan diinvestasikan ke berbagai industri. Di China, pertumbuhan industri asuransi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi makro negaranya (Zhang, 2008) (Greenford & Hwang, 2005)

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yaitu sejumlah uang yang dibayarkan oleh dana pensiun kepada pesertanya setelah peserta tersebut pensiun. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal tahun 2013 peserta dana pensiun di Indonesia hanya membayar iuran untuk dana pensiun rata-rata sekitar 3% dari penghasilannya, yang sangat kecil jika dibandingkan dengan Malaysia yang sebesar 12%. Oleh karena itu, maka kesejahteraan para pensiunan di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia ataupun negara lain yang masyarakatnya sudah lebih sadar terhadap tabungan untuk pensiun.

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Tujuannya untuk membantu masyarakat luas yang membutuhkan solusi pendanaan, mencegah ijon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang (lebih dari 1 tahun) yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), waran, right, reksa dana, instrumen derivatif seperti option, futures, maupun instrumen lainnya. Keberadaan pasar modal diperlukan sebagai instrumen untuk meningkatkan pendanaan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun jumlah investor dalam negeri di Bursa Efek Indonesia (BEI) di berbagai instrumen investasi masih terbilang kecil merupakan

yang paling sedikit di ASEAN. Padahal, peran investor dalam negeri sangat dibutuhkan agar ketergantungan terhadap investor asing bisa berkurang. Selain itu, investor dalam negeri juga bisa mendongkrak kapitalisasi pasar modal Indonesia.

Dengan semakin banyaknya masyarakat yang memiliki akses ke keuangan maka dapat meningkatkan efektivitas kebijakan moneter yang saat ini masih bertumpu pada kebijakan suku bunga dan akan meningkatkan fungsi intermediasi, diversifikasi risiko likuiditas dan kredit. Oleh sebab itu guna meningkatkan akses keuangan yang telah menjadi komitmen nasional, maka diterbitkan Perpres mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Kebijakan keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan yang ditujukan kepada masyarakat untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (*keeping*), transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi atau dengan kata lain untuk menyediakan produk dengan cara yang sesuai. Dengan terwujudnya keuangan inklusif maka akan tercipta kemudahan akses pada lembaga keuangan, terutama untuk 40 persen masyarakat berpendapatan terendah. Melalui keuangan inklusif, ke depannya pemerintah berharap subsidi bisa tersalurkan secara tepat sasaran.

Tabel 1.3 Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2016 per Provinsi

No	Provinsi	Komposit	Konvensional	Syariah
1	Aceh	73,1%	67,6%	41,5%
2	Sumatera Utara	75,6%	75,6%	8,0%
3	Sumatera Barat	66,9%	66,2%	7,3%
4	Riau	69,5%	68,4%	8,4%
5	Jambi	66,9%	66,5%	7,3%
6	Sumatera Selatan	72,4%	71,3%	7,6%
7	Bengkulu	67,3%	65,5%	11,3%
8	Bangka Belitung	69,1%	65,8%	17,5%
9	Lampung	69,8%	66,5%	18,2%
10	Kepulauan Riau	74,5%	74,5%	8,0%
11	DKI Jakarta	78,2%	78,2%	17,5%
12	Jawa Barat	71,4%	67,8%	22,3%

13	Jawa Tengah	66,2%	64,9%	13,8%
14	DI Yogyakarta	76,7%	76,0%	13,5%
15	Jawa Timur	73,2%	68,8%	12,2%
16	Banten	69,5%	65,1%	21,1%
17	Bali	76,0%	76,0%	4,4%
18	Nusa Tenggara Barat	63,3%	59,6%	8,4%
19	Nusa Tenggara Timur	62,2%	61,1%	5,8%
20	Kalimantan Barat	65,5%	63,6%	6,5%
21	Kalimantan Tengah	60,4%	58,5%	7,6%
22	Kalimantan	59,3%	58,5%	2,5%
23	Kalimantan Timur	74,9%	69,8%	12,4%
24	Kalimantan Utara	61,5%	60,4%	2,9%
25	Sulawesi Utara	68,4%	66,9%	5,1%
26	Sulawesi Tengah	65,1%	65,1%	3,6%
27	Sulawesi Selatan	68,0%	61,1%	14,5%
28	Sulawesi Tenggara	66,9%	65,1%	10,9%
29	Gorontalo	62,5%	58,2%	12,4%
30	Sulawesi Barat	65,5%	64,7%	2,9%
31	Maluku	64,0%	63,6%	3,3%
32	Maluku Utara	64,0%	55,3%	24,7%
33	Papua Barat	58,5%	58,5%	2,2%
34	Papua	61,5%	60,0%	5,8%

Sumber: Surve Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016

Namun akses masyarakat Indonesia terhadap layanan keuangan masih relatif rendah. Dapat dilihat pada tabel 1.3 provinsi yang sudah mencapai target hanya Sumatera Utara, DKI Jakarta, D.I Yogyakarta dan Bali. Selebihnya masih belum mencapai target.

Untuk itu (Kumar, 2013) dalam studinya menggunakan enam faktor, yaitu *population density*, *average population per bank branch (APPB)*, *income*, *credit deposit ratio (CD ratio)*, *proportion of factories*, dan *proportion employment* untuk memeriksa dampaknya pada tingkat inklusi keuangan di berbagai negara bagian di India. Penulis menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi regional suatu negara sangat

mempengaruhi tingkat inklusi keuangannya. Hal tesebut didukung oleh penelitian Kendall (2010) dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa jumlah dan volume akun deposit, pinjaman, infrastruktur perbankan (misalnya cabang dan ATM) dan ukuran lain mengukur penggunaan layanan keuangan.

Menurut Kumar (2013) kepadatan penduduk memiliki dampak positif pada kedalaman dan jangkauan sektor keuangan. Namun, menurut Rajput (2017) kepadatan penduduk memiliki dampak yang negatif terhadap penetrasi deposit. (Kumar, 2013) mengungkapkan PDB per kapita dan kepadatan penduduk keduanya secara signifikan dan positif terkait dengan penetrasi akun deposit, membenarkan hasil oleh Kendall et Al. (2010). Dalam penelitian Devlin (2005) menyebutkan proporsi pabrik dan karyawan terhadap populasi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif pada penetrasi deposit.

Peneliti tertarik menggunakan populasi untuk penelitian ini adalah 25 provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2017. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, perbankan berperan besar untuk menjadi motor penggerak kegiatan keuangan inklusif mengingat perbankan Indonesia memiliki andil kegiatan keuangan sampai dengan 80%. Selain itu, terdapat pula artikel yang mengatakan pada situs resmi kompas.com 31 Juli 2018 bahwa Indonesia merupakan negara dengan 58 juta UMKM pada tahun 2017 yang mempekerjakan 89 persen tenaga kerja sektor swasta dan berkontribusi hingga 60 persen dari pendapatan daerah. Dengan meningkatnya Inklusi keuangan maka dapat mempercepat kemajuan untuk mencapai sejumlah prioritas nasional seperti pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, keamanan pangan, persamaan gender dan pertumbuhan yang seimbang.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas mengenai inklusi keuangan dan faktor-faktor penentunya maka terlihat adanya gap di antara teori dan kenyataan yang terjadi di Indonesia. Dengan mengetahui peluang yang Indonesia miliki untuk mendorong ekonomi negara dan sangat penting untuk mengetahui dan memahami inklusi keuangan di Indonesia, maka peneliti tetarik untuk mengetahui faktor-faktor inklusi keuangan di Indonesia dengan melakukan penelitian yang berjudul "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA".

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inklusi keuangan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh masing-masing faktor terhadap inklusi keuangan di Indonesia secara parsial?
3. Bagaimana pengaruh masing-masing faktor terhadap inklusi keuangan di Indonesia secara simultan?
4. Apakah terdapat variasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inklusi keuangan dibeberapa daerah di Indonesia?

Pada penelitian ini alat ukur yang digunakan untuk menganalisis faktor *population density* adalah kepadatan penduduk Indonesia per provinsi, *average population per bank branch (APPB)* adalah jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi dengan jumlah kantor cabang bank per provinsi, *income* adalah produk domestik regional bruto per kapita, *credit deposit ratio (CD ratio)* menggunakan *loan to deposit ratio, proportion of factories* dari produk domestik bruto (PDB) industri manufaktur, dan *proportion employment* adalah jumlah angkatan kerja.

1.4 Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, mengolah data, serta menganalisis apakah ada pengaruh antara *population density*, *average population per bank branch (APPB), income, credit deposit ratio (CD ratio), proportion of factories,* dan *proportion employment* terhadap inklusi keuangan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inklusi keuangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh masing-masing faktor terhadap inklusi keuangan di Indonesia secara parsial.

3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh masing-masing faktor terhadap inklusi keuangan di Indonesia secara simultan.
4. Untuk mengetahui variasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inklusi keuangan dibeberapa provinsi di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah bahwa diharapkan penelitian ini dapat berguna pada pihak-pihak yang terkait dan pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini dilihat dari beberapa aspek diantaranya:

1.5.1 Manfaat Secara Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian yang telah ada dan dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang berhubunganan dengan ilmu manajemen keuangan terutama mengenai inklusi keuangan.

1.5.2 Manfaat Secara Praktis

1. Sebagai tambahan informasi tentang faktor-fator yang mempengaruhi inklusi keuangan sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan investasi untuk investor sehingga dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko yang akan dihadapi ketika melakukan investasi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan referensi serta bahan pertimbangan kepada Pembuat kebijakan seperti Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank komersial saat mereka melakukan pendekatan inovatif untuk di tingkatkan untuk pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, stabilitas sistem keuangan, memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan nonbank serta meningkatkan jumlah pengguna produk dan akses layanan jasa keuangan.

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan acuan bagi penulis selanjutnya mengenai pengaruh *population density, average population per bank branch (APPB), income, credit deposit ratio (CD ratio), proportion of factories,* dan *proportion employment* terhadap inklusi keuangan di Indonesia periode 2010-2017.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *population density* (X_1), *average population per bank branch (APPB)* (X_2), *income* (X_3), *credit deposit ratio (CD ratio)* (X_4), *proportion of factories* (X_5), dan *proportion employment* (X_6) terhadap inklusi keuangan (penetrasi deposit) (Y) di Indonesia periode 2010-2017.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengunakan mengambil sampel pada 25 provinsi di Indonesia periode 2010-2017. Adapun waktu penelitian dilakukan mulai bulan Juli 2018 sampai November 2018.

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penyusunan sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab I berisi tentang gambaran objek penelitian, masalah yang melatar belakangi penelitian dengan merumuskan masalah yang timbul, tujuan dari penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika dari penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian ini, literatur yang digunakan dan kerangka pemikiran yang bersumber dari buku-buku pustaka dan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai dasar pemikiran serta ruang lingkup penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab III berisi mengenai tahapan penelitian yang dilakukan penulis yang disertai penjelasan yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab IV berisi mengenai pengolahan data dan analisisnya dari berbagai aspek yang telah terkumpul.

Bab V Kesimpulan Dan Saran

Bab V berisi mengenai kesimpulan dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, saran yang diberikan pada perusahaan dan saran bagi penelitian selanjutnya.